



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Nalbessy, 09 April 1980, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Nametek KODIM, RT/RW 002/005, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat Lahir, Wailiang 10 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla pada tanggal 10 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2002 melnsungkan pernikahan dirumah dicatat oleh KUA Kecamatan Buru Selatan. Kutipan akta Nikah nomor: 036/22/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002;

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 1 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Nametek sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebgaiman layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
  - Sudarmin Muahaimin Buton Bin Supriadi Buton Laki-laki Umur 17 Tahun
  - Syamsul Bahri Buton Bin Supriadi Buton Laki-laki Umur 16 Tahun
  - Reyhan Renaldi Buton Bin Supriadi Buton Laki-laki Umur 9 Tahun
  - Nur Ramadhani Buton Binti Supriadi Buton Perempuan umur 6 Tahun
  - Idriyani Sari Buton Binti Supriadi Buton Perempuan umur 1 Tahun
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 06 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina mawadah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma Agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat bertatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dan telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan Penggugat yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor 858/01 tertanggal 9 November 2020;

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 2 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya penjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT atas Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 November 2020 dan 19 November 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor 858/01 tertanggal 9 November 2020 dan telah diserahkan kepada Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 3 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/22/VIII/2002, tertanggal 22 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, yang sekarang sudah menjadi xxxxxxxx xxxx Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pengurus masjid, bertempat tinggal di Dusun Nametek RT.001/RW.001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2020, di Kecamatan Buru Selatan, dahulu Kabupaten Maluku Tengah dan sekarang kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nametek, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi di setiap terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi serta

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 4 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung bekas memar pada Penggugat atas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa disetiap Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak-anak hingga bertahun-tahun lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 dengan penyebab yang sama dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasehari Penggugat dan Tergugat agar tetap bersama dalam membina hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sehe-Pilar RT.01/RW.02, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2020, di Kecamatan Buru Selatan,

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 5 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kabupaten Maluku Tengah dan sekarang kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nametek, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak;
- Bahwa disetiap Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah pernah meninggalkan Penggugat dengan anak-anak hingga bertahun-tahun lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 dengan penyebab yang sama dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 6 dari 16 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasehari Penggugat dan Tergugat agar tetap bersama dalam membina hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat secara lisan menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Penggugat sebagai pihak pengaju perkara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu Penggugat telah mendapatkan persetujuan izin cerai yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD xxxxxxxxxx xxxx dengan Nomor 858/01 tertanggal 09 November 2020;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut pula sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat di laksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 7 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutuskan perkara ini pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P. bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan

---

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 8 dari 16 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan pula bahwa Penggugat memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan dan bersesuaian (*innerlijke samen hangen*), serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar pertimbangan, hal tersebut disebabkan saksi Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat yang tentu lebih memiliki kedekatan dengan Penggugat dan lebih mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan pemahaman atas maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI bahwa dalam gugatan cerai yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu di dengar keterangannya adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan berjudi, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, apabila dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi, majelis menilai bahwa adanya kekerasan tersebut merupakan puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Hal tersebut melatarbelakangi pemikiran bahwa adanya fakta yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa

---

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 9 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi suatu kekerasan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan tertentu muatannya adalah adanya sebab akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan adanya fakta saat ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan lamanya hingga putusan ini dijatuhkan, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami segenap fakta yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka secara berurutan fakta-fakta tersebut diurai sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2002;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, serta kepada anak-anak dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang memiliki urgensi yang kuat, yang melahirkan adanya fakta hukum yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

---

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 10 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2002;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya tanggal 27 Maret 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah terjadi dalam setiap rumah tangga disebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang terhadap sesuatu objek atau masalah yang dihadapi. Banyak diantara pasangan suami isteri yang mampu menemukan titik temu dari perbedaan yang ada, jika masing-masing mampu berfikir positif dan meyakini bahwa akan menemukan jalan keluar yang terbaik dari masalah yang ada dan bahkan banyak rumah tangga yang semakin harmonis setelah melalui cobaan dalam bentuk masalah-masalah yang menyimpannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu karena masing-masing berpegang pada egonya serta tidak ada yang mau mengalah demi mempertahankan rumah tangganya, sehingga berlanjut pada masalah pisah rumah. Dengan pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipahami telah hilangnya perselisihan antara keduanya, malah hal tersebut semakin menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, karena pisah rumah antara keduanya tidak dibarengi lagi dengan komunikasi yang baik serta tidak menjaga silaturahmi;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya;

---

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 11 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka suami isteri perlu untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal suami isteri tidak hanya mempunyai hasrat keduniawian saja akan tetapi suami isteri dituntut untuk menerapkan nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam agamanya untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga kekuatan ikatan lahir dan batin antara suami isteri tersebut selalu terjalin dan sangat sulit untuk dilepaskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sudah bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Sehingga dengan mengkomparasikan ayat tersebut dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat berada pada pecahnya sebuah perkawinan, mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh sama halnya

---

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 12 dari 16 hal



mengharapkan datangnya *kemafsadatan* (kemudaratan) yang lebih besar sebagaimana teori hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat yang sudah cukup lama yang berakhir dengan pisah rumah kedua belah pihak hingga

---

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 13 dari 16 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, merupakan kondisi yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, pisah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan suatu bukti bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, namun sudah berkesinambungan dan berkelanjutan. Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik guna memperbaiki rumah tangganya dan hal ini semakin diperkuat lagi dengan ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan. Demikian halnya dengan Penggugat juga sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Padahal sekiranya Penggugat dan Tergugat masih memiliki keinginan untuk rukun, maka persidangan adalah salah satu wahana untuk mencari solusi terbaik terhadap kemelut rumah tangga yang sedang mereka hadapi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 poin 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, dihubungkan dan dikaitkan dengan pasal 1 poin 2 dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga

---

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 14 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Syarifa Saimima, S.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I dan M. Mirwan Rahmani, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 15 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erny Kaimudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Olis Tuna, S.H.I

Syarifa Saimima, S.H.I

Hakim Anggota II,

M. Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti,

Erny Kaimudin, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Nla Hal. 16 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)